



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suharsono, Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak. 2017. *Analisis Yuridis Normatif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas PNS*. Artikel Pajak.
- Ahmad Najiyullah. 2010. *Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Hikerta Pratama*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN SYARIF HIDAYATULLAH. Jakarta.
- Al-qur'an dan Terjemahnya. 2004. CV Karya Insan Indonesia. Jakarta
- Debora Natalia Watung. 2013. *Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya*. Jurnal EMBA, Vol.1, No.3, Hlm 265-273.
- Desmita. 2008. *Psikologi Perkembangan*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Diana, sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama . Bandung
- Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32 /PJ / 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan / Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
- Fitri Aprilyanti. 2013. *Analisis Perhitungan PPH Pasal 21 dan Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Beban Pajak Terutang Pada PT Cakrawala Sejati*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra. Surabaya.
- Gunarso, Sandra Dewi. 2010. "Pemotongan dan Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gros Up" (online)  
<http://sandradewigunarso.blogspot.com/2010/10/pemotongan-dan-perhitungan-pph-ps-21.html>, diakses tanggal 28 April 2017)
- Kotler, Philip. 2003. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kesebelas. Jilid 1 dan 2. PT Indeks. Jakarta
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 / PMK.010 / 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN atau APBD.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi beban APBN dan APBD.

Pitriani. 2016. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Upah Harian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Hulu Sungai Utara, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol 2, No.1, hal 81-92

PSAK No 46 Tentang Pajak Penghasilan.

Renald Runtuwarow, Ingriani Elim. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Peovinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA, Vol 4, No.1, hal 283-294

Sukmadinata, N. S. 2011. *Metode Penelitian pendidikan*. PT Remaja Rosidakarya. Bandung.

Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan undangUndang Terbaru*. PT Indeks. Jakarta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta, Bandung

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Vicky yulindani pratiwi, Srikandi Kumadji, Idris Efendy. 2016. *Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPH Pasal 21 Atas PNS TNI AD Pomdam V/ Brawijaya Surabaya*. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol.10, No.1.